

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) OPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk I periode (satu) Tahun, Pedoman Renja Tahun 2019 ini di atur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan ,tatacara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) Tahun Renja OPD berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis selama lima Tahunan yang dituangkan dalam RENSTRA OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rencana kerja pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 tercantum visi dan misi Pemerintah Jambi menuju Jambi TUNTAS. Untuk pencapaian target dari kinerja instansi pemerintah dimulai dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) yang merupakan langkah awal OPD untuk mendesain Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam Rancangan Rencana kerja, yang tertuang dalam pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan ,tatacara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah :

1. Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu.
2. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.
3. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra OPD
4. Dana Indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

2. Landasan Hukum

Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2019 ini disusun dengan mempedomani :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Renja Pembangunan Daerah tahun 2014.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2017.
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.
11. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tahun 2010 - 2015.

3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Adapun maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah untuk menggambarkan lebih terperinci mengenai Rancangan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai bahan masukan awal penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

4. Sistematika Penulisan

Penyusunan rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2020 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.
2. Landasan Hukum.
3. Maksud dan Tujuan.
4. Sistematika Penulisan.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018

Memuat evaluasi pelaksanaan renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 dan capaian renstra Badan Kesatuan bangsa dan Politik tahun berjalan, hasil evaluasi mengacu pada hasil laporan kinerja .

BAB III : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2019

Mengemukakan rencana program dan kegiatan tujuan, kelompok sasaran dan usulan program dan kegiatan pada Tahun 2019.

BAB IV : PENUTUP

Memuat kata penutup atas rencana kerja perangkat daerah Tahun 2019.

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2018 telah sesuai dengan ketentuan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah untuk memberikan, melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik, gambaran umum program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerja jumlah persentase pelaksanaan layanan dan jasa penunjang lainnya dengan rincian 11 kegiatan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana dengan indikator kinerja jumlah kendaraan dinas /peralatan/perengkapan dalam menunjang kegiatan sarana dan prasana dengan rincian 3 kegiatan.
3. Program peningkatan disiplin aparatur dengan indikator kinerja jumlah aparatur dalam melaksanakan disiplin dalam berpakaian dengan rincian 1 kegiatan.
4. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur indikator kinerja jumlah tenaga terlatih dalam meningkatkan kapasitas kompetensi aparatur melalui pendidikan , pelatihan dengan rincian 1 kegiatan
5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan indikator kinerja tersusunya laporan program dan kegiatan serta rencana kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Jambi dengan rincian 2 kegiatan.
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan indikator kinerja prosentase peningkatan dan mediasi , fasilitasi pemantapan wawasan kebangsaan dengan rincian 4 kegiatan.

7. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan indikator kinerja meningkatkan penanganan masalah aspek ekonomi, politik, sosial budaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban dan hak azasi manusia dengan rincian 6 kegiatan.
8. Program Pendidikan politik Masyarakat indikator kinerja meningkatkan akurasi dan validasi data dan fasilitasi pendidikan politik masyarakat dalam hubungan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat dengan rincian 2 kegiatan
9. Program Perwujudan Demokrasi yang makin kokoh indikator kinerja meningkatkan mediasi dan fasilitasi hubungan lembaga penyelenggara pemilu dengan rincian 4 kegiatan.

Jumlah anggaran dan realisasi anggaran Tahun 2018 per Bulan Desember yang dialokasikan untuk pelaksanaan 9 (Sembilan) Program yang dirinci kedalam 34 (tiga puluh empat) kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

PROGRAM		KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI	
				(Rp)	%
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat menyurat	18.900.000	11.250.000	100
		2. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	124.000.000	105.438.250	85,03
		3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.	101.418.000	99.087.000	97,70
		4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	160.000.000	159.600.000	99,75
		5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	80.000.000	80.000.000	100
		6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	63.129.400	63.129.400	100
		7. Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	59.275.000	59.275.000	100
		8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	25.035.000	25.035.000	100
		9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	9.900.000	99,0

PROGRAM	KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	%
	10. Penyediaan Makan dan Minum Rapat	28.200.000	28.188.000	99,96
	11. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	323.168.470	322.182.737	99,69
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	01 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional.	-		
	02 Pengadaan Peralatan kantor	111.547.000	109.866.000	98,49
	03 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	84.499.447	84.150.000	99,59
	04 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	244.400.000	234.368.100	95,90
	05 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-		
3. Peningkatan Disiplin Aparatur	01 Pengadaan Pakaian Dinas harian	56.550.000	52.650.000	93,10
4. Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur	01 Pendidikan dan pelatihan formal	23.000.000	23.000.000	100,00
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	01. Pembinaan dan Pengembangan perencanaan realisasi program kesbangPol Provinsi Jambi	100.092.000	99.534.000	99,44
	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi	1216.794.000	215.455.148	99,38
6 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	01. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan social dikalangan masyarakat	162.840.000	158.927.270	97,60
	02 Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	151.109.500	150.889.015	99,85
	03 Peningkatan Kesadaran Bela Negara	524.559.113	520.519.200	99,23
	04 Dukungan Penyelenggaraan TMMD ke 98 dan Ke 99	-		

PROGRAM		KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI	
				(Rp)	%
		05 Penyusunan Rencana Aksi Indek Demokrasi Indonesia (IDI) di Daerah	-		
		06 Pembinaan kerukunan umat beragama dalam rangka menciptakan keharmonisan antar umat	258.258.000	251.854.500	97,52
7	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	01 Pembinaan dan Pemantauan Forum kewaspadaan dini masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat dan penanggulangan bencana (Permendagri no 12 Tahun 2006)	308.150.000	305.951.503	99,29
		02. Penertiban/monitoring/Evaluasi dan Pelaporan Rekomendasi penelitian	29.484.000	28.722.000	97,42
		03 Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial	285.962.000	285.866.500	99,97
		04 Pembinaan dan Pemantauan Orang asing, LSM asing (NGO) dan Lembaga Asing	146.905.200	146.274.022	99,57
		05 Pementauan dan Pemetaan Potensi Konflik di Provinsi Jambi	112.986.000	112.604.000	99,66
		06 Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Jambi	116.821.000	115.464.400	98,84
08	Program Pendidikan Masyarakat	01 Koordinasi Forum Diskusi politik	589.841.680	572.723.994	97,10
		02 Monitoring, Evaluasi dan rakor Perkembangan Politik Daerah	331.103.900	327.850.928	99,02
09	Program Perwujudan Demokrasi yang makin kokoh.	01 Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Proses Politik Bagi Lembaga Parpol	203.474.990	195.384.446	96,02

PROGRAM	KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	%
	02 Monitoring dan Evaluasi Eksistensi Parpol, Ormas, OKP, dan Lembaga Keagamaan /Perwakilan di daerah	126.506.500	125.134.244	98,92
	03 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi	372.737.000	367.784.504	98,67
	04 Kerjasama Bidang Kesbangpol dalam Negeri dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi (Permendagri Nomor 20 Tahun 2013)	1.104.252.800	1.093.790.606	99,05

Dan penjabaran sasaran yang ditetapkan dalam 9 (Sembilan) program yang diuraikan dalam 34 (tiga puluh empat) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat dalam bidang administrasi Perkantoran.

Dalam upaya mencapai tujuan kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran diSekretariat sehingga dapat dilayani dan difasilitasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan program yang telah ditetapkan. Maka ditetapkan program dan sasaran sebagai berikut :

PROGRAM 1	SASARAN
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Lancarnya kebutuhan perangko, materai, dan benda pos lainnya selama 1 Tahun.
	2. Lancar dan terdukunnya fasilitasi air, listrik dan telepon.
	3. Terdukungnya biaya jasa pengelola administrasi keuangan.
	4. Terpeliharanya kebersihan di lingkungan kantor dan gedung kantor.
	5. Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan komputer / air conditioner (AC) selama 1 Tahun.
	6. Terdukungnya kebutuhan alat tulis kantor Badan Kesbang

	dan Politik Provinsi Jambi selama 1 Tahun.
	7. Terdukungnya seluruh kebutuhan barang cetakan/penggandaan selama 1 (satu) Tahun.
	8. Terdukung perbaikan/pengadaan komponen listrik/penerangan kantor selama 1 (satu) Tahun.
	9. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.
	10. Tersedianya Makan dan Minum Rapat.
	11. Terdukungnya koordinasi dan konsultasi ke luar / daerah Provinsi Jambi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta fasilitas kerja yang memadai sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif.

Untuk mencapai tujuan diatas, maka disusun program dan sasaran sebagai berikut :

PROGRAM 2	SASARAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.Tersedianya kendaraan dinas / operasional
	2. Terpenuhinya peralatan gedung kantor
	3. Tersedianya jasa pemeliharaan dan perawatan gedung kantor
	4. Tersedianya transportasi mobilitasi aparatur/pejabat 1 (satu) Tahun.
	5. Terpenuhinya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuannya adalah untuk meningkatkan disiplin Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

Supaya tujuan ini dapat tercapai, maka ditetapkan program dan sasaran sebagai berikut :

PRORGRAM 3	SASARAN
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH)

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Jambi.

Supaya tujuan ini dapat tercapai, maka ditetapkan program dan sasaran sebagai berikut :

PROGRAM 4	SASARAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.Bertambahnya pengetahuan dan wawasan staf Badan Kesatuan Bangsa dan politik serta meningkatnya kemampuan profesionalisme dan keterampilan teknis untuk aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan politik

5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan .

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dalam memfasilitasi kelancaran tugas-tugas Badan Kesatuan bangsa dan politik sesuai Program dan Rencana Kinerja yang ditetapkan.

Adapun program dan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

PROGRAM 5	SASARAN
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	1.Sekretariat dan Bidang-bidang Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan pengembangan berwawasan serta kesadaran berbangsa dan bertanah air

PROGRAM 6	SASARAN
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Aparatur Pemerintah dan Pemuda. 2.Aparatur Pemerintah, Guru, Dosen dan Ormasy/tomasy.

7. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Tujuan adalah Pembinaan dan Pemanapan , memelihara ketertiban dan keamanan dalam penanganan penanggulangan bencana.

PROGRAM 7	SASARAN
Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.	1. Polres/Polresta, Satpol PP, masyarakat dan Kesbangpol Kab/kota.

8. Program Pendidikan Masyarakat.

Tujuan adalah memberikan pengenalan pendidikan politik pada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap situasi politik.

PROGRAM 8	SASARAN
Program Pendidikan Masyarakat	1. PNS, Pelajar/Mahasiswa (pemilih pemula) dan Kalangan Perempuan (Gender). 2. Parpol, OKP, LSM, Ormas dan Lembaga Keagamaan dalam Provinsi Jambi. 3. Ormas, OKP, LSM, dan BEM dalam Provinsi Jambi.

9. Program Perwujudan Demokrasi yang makin kokoh.

Tujuan adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat akan penting Pemilu dan Pilkada dan peningkatkan kualitas proses politik bagi lembaga parpol.

PROGRAM 9	SASARAN
Program Perwujudan Demokrasi yang makin kokoh.	1. KPU, Pem, Kesbangpol, Parpol, Ormas, Tomasy, OKP, LSM, BEM PKK dan PNS. 2. Partai Politik dan Lembaga Perwakilan Tingkat Provinsi Jambi.

BAB III
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN 2019

Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2019 mengacu pada Renstra OPD, Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan Bangsa dan Politik, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mempunyai gambaran umum program dan kegiatan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan 11 kegiatan.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan 2 kegiatan.
3. Program peningkatan disiplin aparatur dengan 1 kegiatan.
4. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 1 kegiatan.
5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan 2 kegiatan.
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan 5 Kegiatan
7. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan 6 kegiatan.
8. Program Pendidikan Politik masyarakat dengan 2 kegiatan.
9. Program Perwujudan Demokrasi yang makin Kokoh dengan 4 kegiatan.

Melalui 9 (sembilan) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dari setiap program dan kegiatan Tahun 2019 Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Jambi disusun secara spesifik, realistis dilengkapi dengan indikator Kinerja dan target capaian kinerja yang terukur sehingga dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan, target kinerja dan sasaran kegiatan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu Program Kegiatan.

Program yang telah ditetapkan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Untuk mengukur input dan output perlu indikator yang jelas setiap kegiatan, karena Indikator Kinerja merupakan alat ukur yang spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil , manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capai kinerja suatu program atau kegiatan.

Kelompok Sasaran memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Secara rinci Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2019 dapat dijabarkan dalam 9 (sembilan) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan sebagai berikut :

Tujuan 1

Meningkatkan kualitas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memfasilitasi Program dan Rencana Kerja Aparatur Badan Kesbang dan Politik

No	Program	Kegiatan	Sasaran
1	2	3	4
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Kegiatan Jasa Surat Menyurat	1. Lancarnya kebutuhan perangko, materai dan benda pos lainnya.
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	2. Lancar dan terdukungnya fasilitasi air, listrik dan telepon.
		3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.	3. Terdukungnya biaya jasa pengelola Administrasi Keuangan

		4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Terwujudnya kebersihan di Lingkungan Kantor
		5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5. Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja
		6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	6. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
		7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7. Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan
		8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik & Penerangan Bangunan Kantor	8. Terwujudnya penerangan dan kebutuhan alat elektronik
		9. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Per-UU	9. Tersedianya buku dan bahan referensi
		10. Penyediaan Makan dan Minum Rapat.	10. Tersedianya konsumsi peserta rapat, Konsumsi Tamu
		11. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	11. Bertambahnya pengetahuan PNS terhadap Peraturan Per-UU

Tujuan 2

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta fasilitas kerja yang memadai sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif.

No	Program	Kegiatan	Sasaran
1	2	3	4
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2. Tersedianya pemeliharaan Berkala Gedung Kantor

		2. Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas /operasional	3. Terdukungan sarana dan prasarana aparatur.
		3. Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas /operasional	3. Terdukungan sarana dan prasarana aparatur.

Tujuan 3

Tujuannya adalah untuk meningkatkan disiplin Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

No	Program	Kegiatan	Sasaran
1	2	3	4
1.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1. Tersedianya pakaian dinas Aparatur

Tujuan 4

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

No	Program	Kegiatan	Sasaran
1	2	3	4
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan BinteK	1. Bertambahnya pengetahuan / wawasan serta meningkatnya kemampuan profesionalisme & keterampilan teknis Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

Tujuan 5

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dalam memfasilitasi kelancaran tugas-tugas Badan Kesatuan bangsa dan politik sesuai Program dan Rencana Kinerja yang ditetapkan.

No	Program	Kegiatan	Sasaran
1	2	3	4
1.	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	1. Pembinaan dan pengembangan perencanaan realisasi program kesbang dan politik provinsi jambi 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi	1. Terlaksananya Rencana kerja dan terhimpun /tersusun dengan baik, lengkap, akurat untuk dapat menjadi laporan . 2. Terlaksananya Rakor Jajaran Kesbangpol kab/Kota Se-Prov. Jambi, Terdapatnya Informasi terkini mengenai Program dan Kegiatan Urusan Kesbangpol, Terciptanya Sinkronisasi Program/Kegiatan Kesbangpol Se-Prov. Jambi, Terevaluasinya Program/Kegiatan Kesbangpol Kab/Kota Se-Prov. Jambi

Tujuan 6

Tujuannya adalah untuk Pembinaan dan Pemantapan, memelihara ketertiban dan keamanan dalam penanggulangan bencana.

No	Program	Kegiatan	Sasaran
1	2	3	4
1.	Program	1. Tim Terpadu Penanganan	1. Korem 042/Garpu, Polda Jambi,

	Pemberdayaan masyarakat untuk Menjaga ketertiban dan keamanan	Konflik Sosial	Kejati jambi, Pemkot/Pemkab, SKPD dan Tokoh Masyarakat.
		2. Pembinaan dan pementapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Memelihara Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	2. Polres/Polresta, Satpol PP dan Kesbang Kab/Kota, masyarakat.
		3. Pembinaan dan Pemantauan Orang Asing. LSM Asing, NGO dan Lembaga Asing.	3. Tenaga kerja asing, Peneliti/tenaga ahli asing, wisman, rohaniawan, LSM asing dan tim orang asing Kab/Kota.
		4. Pemantauan dan pemetaan potensi konflik di Provinsi Jambi	4. Aparatur Pemerintah dan masyarakat.
		5. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Jambi.	5. Aparatur Pemerintah dan masyarakat.
		6. Penerbitan/Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan Rekomendasi Penelitian	6. Mahasiswa, mahasiswa asing, peneliti, peneliti asing, lembaga survey dan perusahaan.

Tujuan 7

Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan pengembangan berwawasan serta kesadaran berbangsa dan bertanah air

No	Program	Kegiatan	Sasaran
1	2	3	4
1.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat. 2. Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan. 3. Peningkatan kesadaran bela	1. Tokoh masyarakat, tokoh agama, Aparatur Pemerintah dan Pemuda. 2. Aparatur Pemerintah, Guru, Dosen, dan Ormasy/Tomasy. 3. Pelajar dan Generasi Muda di

		negara.	Kab/Kota Provinsi Jambi.
		4. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dalam Rangka Menciptakan keharmonisan antar Umat	4. Aparatur Pemda, Tomas, Tokoh Agama, Wanhat dan Pengurus FKUB Kab/Kota Se-Prov. Jambi
		5. Penyusunan Rencana Aksi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Daerah	5. Pokja IDI

Tujuan 8

Tujuan adalah memberikan pengenalan pendidikan politik pada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap situasi politik.

No	Program	Kegiatan	Sasaran
1	2	3	4
1.	Program Pendidikan Masyarakat	1. Koordinasi forum diskusi politik. 2. Monitoring Evaluasi dan Rakor Perkembangan Politik Daerah.	1. PNS, Pelajar/Mahasiswa (pemilih pemula) dan kalangan perempuan (Gender). 2. Ormas, LSM, OKP, ORPOL, PNS, dan KPUD. Panwaslu, PARPOL, Lembaga masyarakat lainnya.

Tujuan 9

Tujuan adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat akan penting Pemilu dan Pilkada dan peningkatkan kualitas proses politik bagi lembaga parpol.

No	Program	Kegiatan	Sasaran
1	2	3	4
1.	Program Perwujudan	1. Monitoring dan evaluasi eksistensi Parpol,	1. Parpol, OKP, LSM, Ormas, Lembaga keagamaan dalam

	Demokrasi yang makin kokoh.	Ormas,OKP dan lembaga keagamaan/perwakilan. Daerah. 2. Peningkatan dan pengembangan kualitas proses politik bagi lembaga parpol. 3. Pembinaan Ormas di Provinsi Jambi. 4. Kegiatan Kerjasama Bidang Kesbangpol Dalam Negeri Dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Provinsi Jambi. 2.Parpol, OKP,LSM, Ormas , Lembaga Perwakilan 3. Ormasy, LSM, BEM , OKP, Aparatur 4.Organisasi Kemasyarakatan dalam Provinsi Jambi
--	-----------------------------	---	---

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019, tersaji dalam suatu perencanaan yang tersusun secara sistematis dan menganut Asas Kepatutan sehingga dalam menyusun DPA-SKPD diharapkan mampu mencerminkan OUT-PUT dan INPUT Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2019.

Sebagai bagian penutup dari Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2019 salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa ini disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAMBI ,

Drs. H. M. ASNAWI, AB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195910121989031003